



Malaysia Kembalikan Migran Myanmar

KOH LIPE, KAMIS — Kapal patroli Malaysia menangkap dua kapal migran, Rabu (13/5) di dekat Pulau Penang dan Langkawi. Otoritas Malaysia kemudian mengembalikan dua kapal yang mengangkut ratusan migran etnis Rohingya, Myanmar, itu ke Myanmar. Pada Kamis, satu perahu penuh migran muncul di perairan Thailand.

Bersamaan dengan itu muncul kritik yang menuding pemerintah negara-negara di Asia Tenggara menggantung nasib para migran yang sedang putus asa.

"Semalam satu kapal kami kembalikan lagi ketika memasuki perairan Malaysia di dekat Pulau Penang dan satu kapal kami cegah memasuki perairan Langkawi," kata seorang pejabat Malaysia.

Langkah negara-negara di Asia Tenggara menghalangi masuknya para migran dari Myanmar dan Bangladesh membanjiri kawasan Asia Tenggara ini memicu kekhawatiran, hal tersebut justru membahayakan nyawa para migran di laut.

Hanyut

Sebuah kapal yang dipadati migran Rohingya ditemukan ha-

nyut di perairan Thailand. Ketika sore tiba, beberapa pria dari kapal itu melompat ke laut untuk mengambil paket makanan yang dijatuhkan helikopter Angkatan Laut Thailand.

Seorang migran mengatakan, 10 rekan mereka tewas selama perjalanan. "Kami melempar jendang mereka yang tewas ke laut," katanya. Dia menambahkan, mereka telah terkatung-katung di laut selama dua bulan. Mereka hendak pergi ke Malaysia, tetapi mereka belum juga tiba.

Banyak anak berada di antara para migran yang kondisinya semakin lemah tersebut. Kapal mereka ditemukan di dekat Pulau Koh Lipe di Laut Andaman, Thailand Selatan. Sajida (28) berlayar bersama empat anaknya yang masih kecil dan berupaya memasuki Malaysia.

Tindak tegas

Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan kelompok hak asasi manusia mengatakan, ribuan laki-laki, perempuan, dan anak-anak terjebak di laut, mengalami kelaparan dan sakit setelah polisi Thailand menindak tegas upaya penyelundupan manusia tersebut.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan, Thailand yang menyerukan pertemuan regional pada 29 Mei mendatang untuk membahas isu migran Rohingya juga memiliki kebijakan yang sama, tak mengizinkan kapal-kapal migran memasuki perairan Thailand.

Pill Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, mengatakan, Angkatan Laut Thailand, Malaysia, dan Indonesia harus menghentikan "permainan mem-pingpong" para migran tersebut. Mereka justru seharusnya bekerja bersama untuk menyelamatkan mereka yang terkatung-katung di atas kapal tersebut.

Dunia justru akan menyalahkan negara-negara tersebut karena memperlakukan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Di Indonesia, pekan lalu, ratusan migran Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh mendarat di Lhoksukon, Aceh.

Amnesty International menyatakan sangat mengerikan memikirkan ratusan orang yang kini terkatung-katung di atas kapal dan berjuang melawan maut, tanpa makanan ataupun air, serta tak diketahui di mana mereka kini berada. (AFP/LOK)



Akurasi Data untuk Cegah Konflik Sosial

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta petugas Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 memperhatikan prinsip akurasi. Diharapkan, konflik antarwarga terkait program perlindungan sosial pemerintah tak terulang dan bantuan pun benar-benar tepat sasaran.

"Dulu, ketika pemerintah menyalurkan BLT (bantuan langsung tunai), konflik muncul karena ada warga yang dianggap tidak patut justru dapat bantuan dan sebaliknya. Kuncinya pada akurasi data acuan. Jangan sampai terulang lagi," kata Djarot saat memberikan pembekalan kepada petugas Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 tingkat DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (13/5).

Basis data terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan, serta keterangan dasar sosial ekonomi individu dan rumah tangga di Indonesia. Data itu akan digunakan sebagai acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Saat ini, BDT dipakai sebagai dasar penetapan sasaran sejumlah program, seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Bantuan Siswa Miskin, Program Indonesia Pintar, Jaminan Ke-

sehatan Nasional, dan Program Keluarga Harapan. Selain memperbaiki akurasi data, pemutakhiran diharapkan dapat menjangkau keluarga miskin yang selama ini belum tercakup.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Nyoto Widodo menambahkan, forum konsultasi publik akan digelar pada Mei-Juni 2015 untuk memutakhirkan informasi daftar awal dan memasukkan rumah tangga miskin yang belum terjangkau.

Data BPS DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin DKI Jakarta pada September 2014 mencapai 412.790 orang (4,09 persen), naik dibanding September 2013 yang mencapai 371.700 orang (3,72 persen) atau Maret 2013 yang 352.960 orang (3,55 persen). Distribusi pendapatan pun kian timpang antara yang kaya dan miskin, tecermin dari rasio gini yang bertambah dari 0,381 tahun 2010 menjadi 0,436 tahun 2014.

DKI juga menghadapi persoalan pengangguran. Februari 2015, jumlah penganggur tercatat 463.900 orang, naik dibanding Agustus 2014 yang mencapai 429.110 orang. Jumlah penganggur meningkat sejalan bertambahnya jumlah angkatan kerja dari 5,06 juta orang pada Agustus 2014 menjadi 5,54 juta orang pada Februari 2015. (MKN)

Imigran di Aceh Utara Mulai Didata

LHOKSUKON, KOMPAS — Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Penderitaan Bangsa-Bangsa (UNHCR) mulai mendata imigran asal Myanmar dan Bangladesh yang terdampar di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pendataan untuk memastikan status pengungsi guna menentukan penanganan yang akan diberikan kepada imigran itu.

Anggota staf Humas UNHCR Indonesia, Mitra Salima, ditemui di lokasi penampungan imigran di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Cangko, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, Kamis (14/5), mengatakan, penanganan terhadap imigran memiliki beberapa tahapan. Tahapan awal adalah melakukan penanganan tanggap darurat berupa menyediakan kebutuhan dasar, seperti logistik, kesehatan, dan tempat istirahat. Tahapan itu sudah dilakukan pemerintah bersama sejumlah lembaga saat awal imigran itu tiba.

Mitra menuturkan, pihaknya melakukan penanganan jangka

pendek, yaitu mendata atau melakukan registrasi terhadap imigran itu. Penanganan itu tengah dilakukan, antara lain, dengan menanyakan identitas, asal negara, dan alasan keluar dari negara asal itu.

Mitra menambahkan, pendataan penting untuk menentukan status imigran itu. UNHCR bisa memastikan imigran itu bertujuan mencari suka atau ingin mencari pekerjaan saja. Jika imigran itu mencari suka, UNHCR bersama lembaga lain dan pemerintah terkait berupaya memfasilitasinya.

"Jika imigran itu hanya ingin mencari pekerjaan, kami akan menyerahkan mereka ke negara untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, seperti dikembalikan ke negara asal," ucapnya.

Mitra menyampaikan, umumnya imigran asal Myanmar berasal dari suku Rohingya. Suku itu menjadi komunitas yang tertindas saat ini oleh sejumlah sebab, seperti tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pe-

kerjaan di negara asalnya. Di Bangladesh, kondisinya lebih baik. "Berdasarkan pengalaman, imigran asal Myanmar keluar dari negaranya karena ingin mencari suka. Imigran asal Bangladesh cenderung mencari pekerjaan," katanya.

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Lhokseumawe per Kamis sore, imigran yang terdampar di Aceh Utara berjumlah 584 orang, terdiri dari 358 orang asal Myanmar dan 226 orang asal Bangladesh. Mereka telah dipindahkan dari penampungan GOR Lhoksukon, Aceh Utara, ke TPI Kuala Cangko, Rabu.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe Muhammad Akmal, imigran yang tidak diakui negaranya atau tidak memiliki identitas resmi memiliki potensi tetap di Indonesia, yakni ditampung di Rumah Detensi Imigrasi di 16 tempat di Indonesia. Imigran yang keluar dari negaranya untuk mencari pekerjaan atau memiliki identitas akan dikembalikan ke negaranya. (DRI)



KKR Perlu Siapkan Rencana Konkret

JAKARTA, KOMPAS — Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi langkah positif untuk mengungkap kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Karena itu, jika nantinya sudah terbentuk, sebelum bekerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus menyiapkan rencana konkret yang didasarkan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan yang obyektif.

"Pengungkapan kebenaran yang obyektif akan menemukan pelaku, korban, dan dimensi penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) terjebak pada rekonsiliasi semata karena tak akan menyelesaikan masalah," ujar Wakil Direktur Human Rights Working Group Choirul

Anam, Kamis (14/5) di Jakarta.

Seperti diberitakan, akhir April lalu, Jaksa Agung menyatakan, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, pemerintah akan membentuk KKR yang terdiri dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Tentara Nasional Indonesia; Badan Intelijen Negara, serta Komnas HAM.

Menurut Anam, langkah konkret tersebut meliputi penentuan kategori saksi pelaku, menyiapkan hak reparasi korban, dan meluruskan sejarah yang sudah telanjur salah dipahami masyarakat. Selain itu, kinerja KKR juga harus memiliki kerangka waktu, khususnya dalam meng-

investigasi suatu kasus.

KKR dalam bekerja diharapkan tidak hanya terpatok untuk memprioritaskan kasus yang akan diungkap, tetapi lebih baik ditentukan terlebih dahulu indikator kasus, skema waktu, dan substansi dari kasus yang dihadapi. "Sebab, dikhawatirkan akan terjadi tarik menarik kepentingan yang kuat untuk menutupi suatu kasus oleh pengungkapan kasus yang lain," ujar Anam.

Banyak data

Adapun beban tim KKR dinilai tidak terlalu berat, karena data-data peristiwa pelanggaran HAM masa lalu sudah banyak dikumpulkan, baik oleh Komnas HAM maupun oleh masyarakat.

Sementara itu, Komisioner

Komnas HAM, Nur Kholis, mengatakan, sebaiknya KKR menekankan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti kerusuhan 1965, kasus penembakan misterius, kasus Talangsari, tragedi Semanggi I dan II, serta penculikan aktivis di tahun 1997-1998.

Nur Kholis menyatakan pihaknya juga mengusulkan penyelesaian kasus lewat KKR menggunakan dua cara, yaitu mekanisme yudisial dan nonyudisial. Komnas HAM juga akan mengusulkan pembentukan tim independen yang ditunjuk lembaga negara yang terlibat dalam pembentukan KKR. "Tim independen ini seperti komite yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden," katanya. (B07)

Suciwati Duga Ada Rekayasa Dokumen

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diduga merekayasa dokumen di antaranya persetujuan Suciwati, istri aktivis HAM Munir, dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana pembunuh Munir.

"Saya sama sekali tak pernah diwawancarai atau diminta pendapat terkait pemberian pembebasan bersyarat Pollycarpus. Namun, dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan, ada keterangan saya menyetujui itu," kata istri Munir, Suciwati, saat menjadi saksi di sidang lanjutan gugatan pembebasan bersyarat Pollycarpus di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Rabu (13/5).

Suciwati juga menunjukkan tak dipenuhinya syarat substantif di antaranya adanya kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukannya, serta perilaku baik dari Pollycarpus. "Ia masih mengatakan tak bersalah. Kalau memang tak bersalah, ungkap siapa di balik semuanya. Itu untuk membuktikan penyesalannya

menghilangkan nyawa orang," ujar Suciwati, yang ditelepon Pollycarpus, September 2013.

Pada 7 September 2004, Munir meninggal dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam. Pollycarpus menjadi terpidana pembunuhan Munir. Pada 13 November 2014, Kemenkumham membebasakan bersyarat Pollycarpus selesai menjalani 8 tahun dari 14 tahun masa hukumannya.

Kepala Bagian Fasilitas dan Pengaduan Masalah Hukum Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nur Ichwan, menepis tuduhan pihaknya merekayasa dokumen. "Jangan ditarik ke belakang (persolannya). Masalah pidananya sudah selesai. Untuk pembebasan bersyarat, semuanya sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU Pemasarakatan. Jadi, tak ada rekayasa," katanya.

Selain menyatakan keterangan Suciwati tak relevan dengan pokok materi, Nur juga menjanjikan akan menunjukkan bukti dan saksi pada sidang lanjutan

gugatan Imparsial tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, selain syarat substantif juga ada administratif yang harus dipenuhi terpidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Salah satu syarat administratif itu adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat pembimbing kemasyarakatan. Adapun syarat substantif, beberapa di antaranya harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggarannya, serta adanya kekeluargaan yang baik.

Sebelumnya, hakim anggota Teguh Satya Bhakti menanyakan ke Habiburokhman, kuasa hukum Pollycarpus. "Apakah klien bapak pernah minta maaf dan menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga korban?"

Habiburokhman mengaku tak tahu. "Klien saya sudah bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menjalani hukuman yang sesuai vonis. Pembebasan bersyaratnya juga sesuai prosedur," ujarnya. (IAN)



KOMPAS/RIZA FATHONI

Gugatan pembatalan pembebasan Pollycarpus, istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati, hadir sebagai saksi dalam sidang gugatan pembatalan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembebasan bersyarat Pollycarpus Budihari Priyanto di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Rabu (13/5). Dalam gugatan tersebut, penggugat menilai keputusan Menkumham tak mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

May 1998 monument hailed as 'sign of state responsibility'

Ati Nurbaiti

THE JAKARTA POST/JAKARTA

The families of those who died in the May 1998 riots, as well those who survived, expressed relief on Wednesday that a monument marking the unresolved violence had finally been officiated, as activists commended the administration's role in realizing the monument.

The monument is the result of cooperation between the administration and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan).

The families and survivors said it had eased much of the stigma, fueled by the view that the victims were looters and by the denial that many were raped.

"A neighbor told me my child deserved to die because he was among those who looted the mall," said Imas, the mother of 17-year-old victim Kholid Yusmana.

Imas is not sure where her child's remains are, but comes every May to Pondok Ranggan public cemetery to pray for those who died.

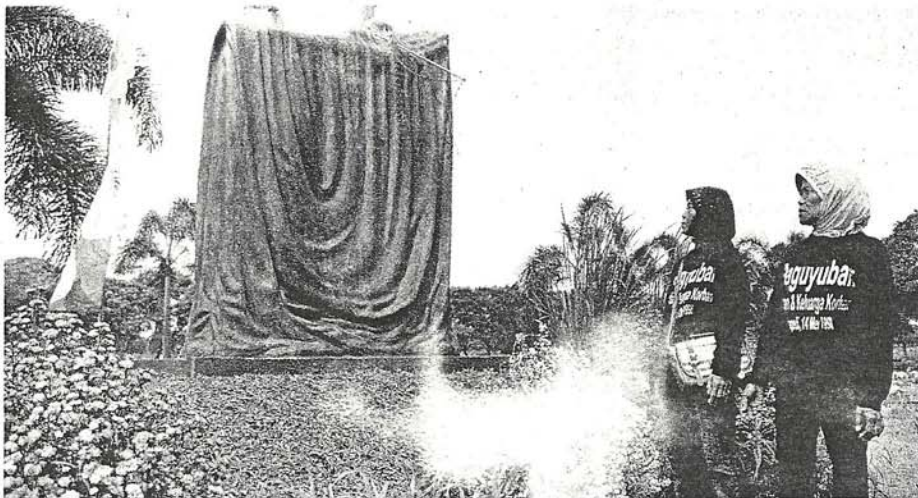
Many people went missing on May 13. It was later revealed that the nearby Central Plaza Klender, now Citra Mall Klender, had caught fire, killing almost everyone inside.

Over 100 graves at the cemetery in one of the blocks are marked "Korban tragedi Mei 98 [victim of May 98 tragedy]."

"You should all receive special privileges as the victims of the May riots," said the administration's Citizen Monitoring Unit assistant to the deputy head Marulah Matali, who attended the event on behalf of Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

The city, he said, would ensure that the parents of the missing and dead would receive their rights, such as allowances for the poor and health coverage.

Ahok, during his tenure as the Jakarta deputy governor, laid the



JP/Wendra Ajistiyatama

Preserving memory: Mothers of victims of the May riots observe the May 98 Monument at the victims' mass grave site in Pondok Ranggan public cemetery in East Jakarta after the monument's inauguration on Wednesday. The monument was erected as a reminder of the victims and of the unresolved tragedy.

- » Komnas Perempuan, administration work together to realize monument
- » Victims of riots should receive special privileges, says city official
- » Many still deny sexual violence in riots took place, says activist

first stone for the memorial last year, which marked the beginning of its construction.

The monument designer, Awan Simatupang, said he had designed the monument in the form of a hand sewing a piece of torn fabric, to symbolize damaged situations and victims' families' wounds that needed to be healed by truth and justice.

"I chose a piece of fabric and a

needle because most of the mothers of the victims are tailors," he said.

Komnas Perempuan chairwoman Azriana said her organization was glad that the administration had responded favorably to the families' demands. "This is a sign of the state's acknowledgement and responsibility for the tragedy," she said.

No one has been held accountable for the May riots in Jakarta and other cities, which followed the May 12, 1998 shootings of four students at Trisaki University. The May 1998 monument was officiated by the victims' families, Komnas Perempuan and the administration at Pondok Ranggan cemetery.

Denial was the main obstruction to realizing the monument, said former commission chairwoman Yuniyanti Chuzaifah.

Current chairwoman Azriana said that "until today, many still

deny there were victims of sexual assault", despite the findings of the government-appointed Joint Fact-finding Team, which said there were 89 victims of rape, sexual assault and torture, mainly Chinese Indonesians.

"Continuing to push for victims to testify amid the absence of guarantees for their safety corners the victims even more, worsening their recovery process," Azriana said.

"We do not talk of May 1998 to gain revenge," Nancy Widjaja of the Indonesian Chinese Women Association told *The Jakarta Post*, "but to ensure that such a thing never happens again. The young generation must know how to maintain harmony. Indonesia is not Indonesian without its diversity."

City officials said Pondok Ranggan would be included as a "religious destination" for tourists. (prn)

JAK - POST, 15 MEI 2015 (7)

More trafficking cases uncovered

Tama Salim

THE JAKARTA POST/JAKARTA

A government-commissioned task force has uncovered more illicit labor practices in Indonesia's eastern provinces after ongoing investigations into the audit results of companies in the fisheries sector.

According to the head of the anti-illegal fishing task force under the Maritime Affairs and Fisheries Ministry, Mas Achmad Santosa, several fishery companies operating out of Ambon, Maluku, could be involved in human trafficking.

Achmad said his team managed to identify the perpetrators among a pool of 14 companies that were found guilty of employing foreign workers, but refused to divulge any numbers or identities, pending an official statement from Maritime Affairs and Fisheries Minister Susi

Pudjiastuti.

"We've identified companies that are involved in human trafficking practices, but the team won't reveal these companies until Minister Susi files a report with the National Police chief and it is legally processed like the Benjina case," Achmad told *The Jakarta Post* at his Central Jakarta office on Wednesday.

Achmad said the team had conducted an audit that analyzed and evaluated foreign-built vessels of 16 Ambon-based companies, and discovered that only two firms did not employ foreign workers. The 2009 Fisheries Law bans the employment of foreign crew members.

"These 14 companies run a combined total of 119 vessels with 2,061 crew, most of whom originate from Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia," Achmad said, adding that there was a strong indication that

most of these foreign workers were victims of human trafficking.

Following the discovery of the practice, the team issued a series of recommendations for Minister Susi regarding future compliance audits on fisheries companies, which included the implementation of a human rights audit, which Achmad argues "must be part and parcel of the evaluations and permit-granting procedure".

Indonesia has ratified the 1999 UN Convention on forced labor and has at least three legal instruments that guarantee punitive action, including Law No. 21/2007 on human trafficking that carries a maximum prison sentence of 15 years.

The Ambon case emerges on the back of investigations into a similar case exposed early last month by foreign media reports of alleged forced labor practices on the remote

island of Benjina, also in Maluku.

Police accused officials from PT Pusaka Benjina Resources (PBR), which is the only official fishing operation on the island, of having tricked hundreds of foreign workers into forced labor.

Achmad said investigations into the Ambon case revealed how the modus operandi for acquiring workers was similar to the Benjina case.

He said workers were promised high wages and then subsequently robbed of their freedom, unaware as to the nature and location of their work.

"Most of these workers arrive in Thailand and are sold off by labor brokers, fetching around 15,000-30,000 baht [US\$455-908] per person," Achmad said.

According to data from the International Organization for Migration (IOM), which has partnered

with the task force to investigate incidents of human trafficking in the region, there have been a number of cases reported in Ambon throughout the years, with five Myanmar nationals being the most recent victims recorded in February 2015.

Additionally, the IOM found 16 victims of human trafficking last September and 17 people in June earlier that year.

In Dec. 2013, the IOM reported 33 victims from Myanmar, Thailand and Cambodia.

Meanwhile, the National Police, which recently arrested seven suspects in the Benjina case, are close to naming another 12 or 13 suspects based on the evidence collected.

Head of the human trafficking unit under the police force's detective division, Adj. Sr. Comr. Arie Dharman-told the *Post* on Wednesday that authorities had sent a letter to the

Thai Embassy in Jakarta to inform them of the possibility that several of their citizens would be incarcerated for criminal charges.

Arie said the suspects could be charged with human trafficking charges stipulated in Articles 2, 3 and 13 of Law No. 21/2007, which carried a maximum prison sentence of 15 years and a fine of Rp 600 million (\$46,000).

Previously, the police arrested PBR employees Hermanwir Martino and Mukhlis Ohoitenan, as well as Thai ship captains Hatsaphon Phaetjakreng, Bonsom Jaika, Surachai Maneephong, Somchit Korra-neesuk and Yongyit N.

The police had taken a sample of 50 victims out of the 357 Benjina victims for questioning, with testimonies indicating the involvement of several ship captains in the forced confinement of workers, Arie said.

Acen govt ✓ to relocate Myanmarese, Bangladeshis

Hotli Simanjuntak

THE JAKARTA POST/BANDA ACEH

The Aceh provincial administration has relocated 584 refugees from Bangladesh and Myanmar to a new location in Kuala Cangkoï village in North Aceh regency to facilitate data-collection and prevent decampment.

The relocation is also aimed at preventing the spread of diseases that may have been contracted during the long voyage at sea.

"We will be responsible for handling matters such as providing food and temporary accommodation," said North Aceh Regent Muhammad Thaib.

He said the presence of the Myanmarese and Bangladeshi refugees had drawn the sympathy of local residents, many of whom volunteered to help administer various forms of assistance.

"Many of them helped provide refugees with food, water and clothing," Thaib said.

Due to the close contact, some officials grew concerned that diseases might spread and refugees flee.

The UN High Commission for Refugees (UNHCR) and International Organization for Migrations (IOM) are furthering efforts to deal with the emergency and attend to the health of refugees.

"We are able to deal with the emergency situation, thanks to effective cooperation with the local administration," UNHCR spokesperson Mutiara Salima Suryono said.

Mutiara added that the UNHCR was beginning to register refugees and record their reasons for having left their home countries.

"We will try to register and identify those who are seeking asylum and those who are just seeking jobs," said Mutiara.

Data collection is important because the refugees come from two different countries. For those proven to be from the Rohingya ethnic group, they will automatically be put under the care of the UNHCR.

"We hope the Indonesia government will accommodate them temporarily as we determine their status. We currently are not yet aware if their motivations are to seek asylum or to find work," said Mutiara.

"If the UNHCR discovers persons who are refugees because [their citizenship] is not recognized by the Myanmarese government, the UNHCR hopes Indonesia will provide such persons with protection and a temporary place to stay while they apply for refugee-status, which is currently being processed by the UNHCR," Mutiara added.

"However, if they are proven only to be job-seekers, the UNHCR will hand the matter over to the government to decide where they will be placed," Mutiara said.

Currently, Rohingya refugees are not regarded as citizens by the Myanmarese government.

"If they [are found to be Rohingya Muslims seeking asylum because they are] not recognized by the state, then they don't have rights as citizens, such as [the right] to education and employment. We cannot return them to their country of origin [if this is the case]," said Mutiara.

The stranded immigrants were believed to have been on the way to Malaysia when their boat encountered engine trouble and ran out of fuel, leaving them adrift in the middle of the ocean, eventually stranding them in Aceh on Sunday.

This is the eighth time Myanmarese citizens from the Rohingya Muslim ethnic group have been stranded in Aceh since 2009.

The Rohingyas, who are not recognized as a minority group by the Myanmar government, have become the target of attacks launched by the Buddhist Rakhine ethnic group in recent years.

» RELATED STORIES p7, p10

JAK-POST, 15 MEI 2015 (8)

Sindir Negara Lain, Indonesia ✓ Takkan Usir Pengungsi Rohingya

RAKYAT MERDEKA, 15 MEI 2015 (9)

Meski tidak ikut dalam Konfensi Pengungsi 1951, Indonesia tidak akan mengusir pengungsi warga Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh. Para pengungsi saat ini ditampung di gedung olahraga Lhoksukon di Aceh Utara, sebelum diserahkan ke urusan pengungsi PBB.

INDONESIA telah menampung 582 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan di Aceh Utara Minggu (10/5). "Tidak seperti pihak lain (negara lain), kami tidak memasukkan pengungsi ini ke kapal dan mengirimnya ke tengah laut," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menepis tuduhan, Indonesia telah mengusir para pengungsi itu.

Menurut Thata, Indonesia menerapkan *non-refoulement*. Yakni, prinsip suatu negara tidak boleh mengembalikan atau mengusir para pengungsi yang tiba di negara mereka.

"Indonesia mematuhi prinsip itu, meski Indonesia bukan tujuan para pengungsi. Pemerintah menyediakan penampungan, memberi makanan dan obat-obatan atau bahan bakar," jelas Thata.

Kepada 582 pengungsi Rohingya, lanjut Tata, pemerintah memberi obat dan membantu

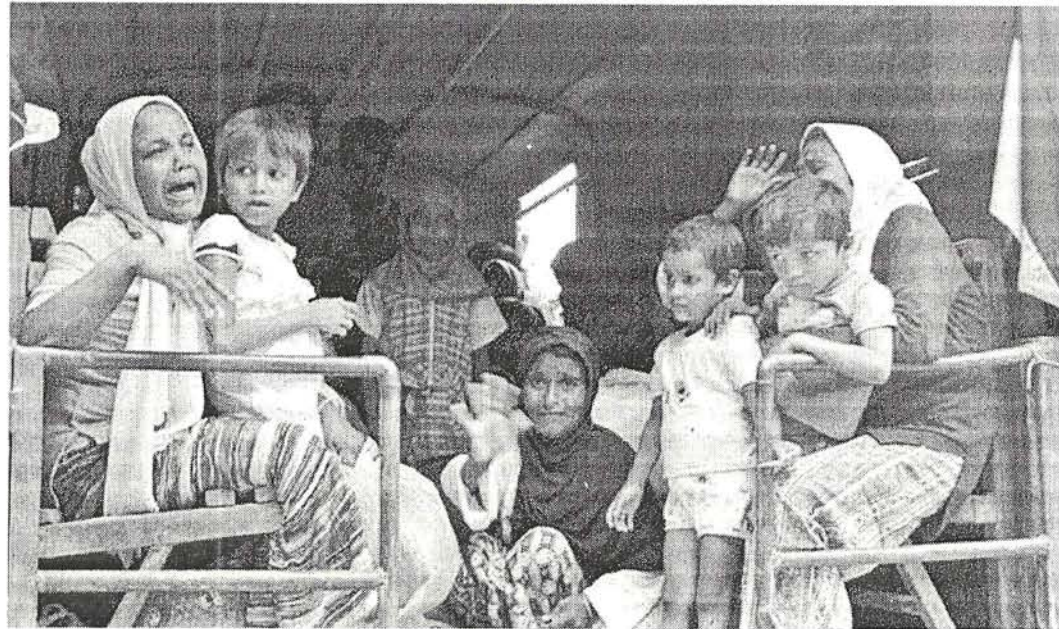
mereka mengurus identitas. Pemda bekerja sama dengan Organisasi Migrasi Internasional untuk mencari tempat yang lebih layak dan memadai untuk mereka.

"Lalu, kami akan serahkan mereka kepada UNHCR (Badan PBB Urusan Pengungsi). Kami tidak pernah mengusir," tegas pria berkacamata itu.

Thata juga membantah kabar, Kapal TNI telah menolak kapal pencari suaka di Selat Malaka. Menurut dia, para pengungsi berkomunikasi dengan KRI Sutanto.

"Para pengungsi ingin menuju Malaysia. Mereka hanya meminta makanan, air bersih, dan bahan bakar. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Jadi tidak benar kalau kapal TNI AL mengusir kapal pengungsi Rohingya," paparnya.

Terkait Rohingya, Thailand akan berbicara dengan ASEAN dan PBB tentang kemungkinan



NAIK MOBIL: Pengungsi Rohingya di dibawa ke penampungan sementara di Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara.

mendirikan semacam tempat khusus bagi etnis Rohingya yang diselamatkan dari praktik perdagangan manusia. Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menganggap perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional, sehingga organisasi internasional harus dilibatkan.

Dana Australia

Pada kesempatan itu, Thata meluruskan masalah pemotongan dana bantuan dari Australia. Menurut Thata, tidak ada hubungan antara pemotongan 40 persen bantuan ke Indonesia dengan eksekusi duo Bali Nine akhir April lalu.

"Pemotongan dana bantuan

tidak hanya kepada Indonesia. Sejumlah negara di Afrika juga mengalaminya. Bahkan ada yang dipotong sampai 70 persen. Pemotongan dana dikarenakan Indonesia dinilai memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Dana bantuan akan dialihkan ke negara di kawasan pasifik," jelas Tata. ■ DAY



Chat News

Keperawanan Calon Tentara Harus Suci ✓

TES keperawanan untuk perempuan calon prajurit TNI kembali jadi sorotan. Hal itu menjadi perbincangan pegiat dunia maya. Banyak juga yang meminta agar tes itu dihentikan.

Kritikan tes keperawanan datang dari LSM pembela hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW), kemarin. HRW mendesak tes keperawanan untuk perempuan calon prajurit dan calon istri anggota TNI dihapus.

Direktur Advokasi Hak Perempuan HRW Bisha Varia menganggap tes itu sangat merugikan perempuan dan tidak relevan dengan tugas TNI menjaga keamanan nasional. Menurutnya, itu menyakitkan, memalukan dan meninggalkan trauma bagi 'korban'.

"TNI harus menyadari bahwa tes keperawanan yang menyakitkan dan memalukan terhadap perempuan calon prajurit tak ada hubungannya dengan keamanan nasional," kata Nisha dalam keterangan resminya.

Nisha meminta Presiden Jokowi segera menghapus tes keperawanan dari persyaratan masuk militer. Dia juga mengimbau seluruh rumah sakit militer menolak melakukan tes tersebut. Menurut dia, tes keperawanan adalah bentuk kekerasan berdasarkan gender yang telah ditolak secara luas.